



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 16 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN BANDONGAN, TEMPURAN DAN BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa sejalan dengan lajunya pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan kota-kota di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Kota Kecamatan disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi Wilayah sekitarnya ;
 - bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota Kecamatan dipandang perlu untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kecamatan ;
 - bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan batas Wilayah Kota Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
ELANG

B

1



- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor ? Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN BANDONGAN, TEMPURAN DAN BOROBUDUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan ;
- e. Kota Kecamatan adalah Kota Kecamatan Bandongan, Tempuran dan Borobudur ;
- f. Ibu Kota Kecamatan adalah Kota sebagai Pusat pemerintahan, pemukiman dan pelayanan masyarakat di wilayah itu ;
- g. Wilayah Kota adalah Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang memadai, tumbuh dan berkembang kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- h. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan Wilayah Kota dan Wilayah bukan Kota ;
- i. Tanda Batas Wilayah adalah tanda batas Wilayah Kota Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar, guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Memudahkan instansi / Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan pembangunan.

BAB III BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

Batas Wilayah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan Bandongan, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Borobudur.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Bandongan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | Desa Sidorejo, Desa Gandusari, dan Desa Trasan. |
| Sebelah Timur | : | Desa Trasan, Desa Banyuwangi. |
| Sebelah Selatan | : | Desa Sukodadi. |
| Sebelah Barat | : | Desa Tonoboyo. |

(2) Batas wilayah Kota Kecamatan Tempuran ditetapkan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Prajgarsari.
- Sebelah Timur : Sungai Progo, dan Desa Sumberarum.
- Sebelah Selatan : Desa Tanggulrejo dan Sidoagung.
- Sebelah Barat : Desa Jogomulyo, Desa Girirejo dan Tanggulrejo.

(3) Batas wilayah Kota Kecamatan Borobudur ditetapkan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Progo, Desa Bumiharjo, dan Saluran Irigasi Sawah Desa Wringin Putih.
- Sebelah Timur : Sungai Progo, dan Jalan Kampung Desa Wanurejo.
- Sebelah Selatan : Sungai Sileng.
- Sebelah Barat : Desa Kembanglimus dan Desa Karangrejo.

Pasal 6

(1) Desa-desa yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Bandongan ialah :

- a. Seluruh Desa Bandongan, dengan luas 372 Ha.

(2) Desa-desa yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Tempuran ialah :

- a. Sebagian Desa Sidoagung, dengan luas 188 Ha.
- b. Seluruh Desa Tempurrejo, dengan luas 343 Ha.
- c. Sebagian Desa Tanggulrejo, dengan luas 68 Ha.
- d. Sebagian Desa Girirejo, dengan luas 41 Ha.

(3) Desa-desa yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Borobudur ialah :

- e. Seluruh Desa Borobudur, dengan luas 421 Ha.
- f. Sebagian Desa Wanurejo, dengan luas 102 Ha.
- g. Sebagian Desa Wringin Putih, dengan luas 123 Ha.

Pasal 7

Uraian peincian Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN BATAS WILAYAH

Pasal 8

- (1) Penetapan Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberi tanda Batas Wilayah yang jelas, berupa patok-patok koordinat.
- (2) Tanda Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Pada jalan-jalan besar yang masuk ke dalam Wilayah Kota dan tempat-tempat strategis diberi Tanda Batas berupa Tugu Batas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Batas Wilayah Kota Kecamatan, yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Januari 1997.

D P R D BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G
K E T U A

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

D I S A H K A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor : 188.3/292/1997, Tanggal 27 Agustus 1997

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,
ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 16 Tahun 1997 ; Tanggal 4 September 1997

Seri D ; Nomor 16

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.

NIP. 500 034 460.

Ketua BAPPEDA.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN BANDONGAN, TEMPURAN DAN BOROBUDUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

1. PENJELASAN UMUM.

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Wilayah Kecamatan telah menunjukkan perkembangan yang pesat.

Perkembangan Kota tersebut diakibatkan oleh makin meningkatnya Urbanisasi dan semakin besarnya volume dan kegiatan Pembangunan pada sektor Perkotaan, sehingga Wilayah Pemukimanyang bercirikan perkotaan makin bertambah.

Perkembangan kota-kota tersebut di samping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat perkembangan bagi Wilayah sekitarnya sehingga mampu mengendalikan pembangunan fisik sesuai dengan karakteristik Kota.

Oleh karena itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada Kota-kota tersebut, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d. 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
-